

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Belanja Modal (BM) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2014, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2014.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2014.
3. Dana Perimbangan (DP) tidak berpengaruh dengan arah yang negatif terhadap variabel dependen yakni Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2014.
4. Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh dengan arah yang negatif terhadap variabel dependen yakni Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2014.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya, melihat pengaruh yang dihasilkan variabel independen terhadap variabel dependen masih kecil, maka saran yang dapat diberikan untuk menambahkan variabel lainnya seperti Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang juga termasuk pendapatan suatu daerah selain PAD dan Dana Perimbangan.

2. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diganti dengan menggunakan pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Indeks Kemampuan Rutin dan Rasio Keserasian.
3. Untuk pemerintah daerah kabupaten/kota agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, sehingga mengurangi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya. Kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerahnya adalah bukti bahwa pemerintah daerah tersebut telah melakukan desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota daerah itu sendiri.